

PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA (KB) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3P2&KB) KOTA PADANG

Oleh:

Rini Parmila Yanti, Zulkarnaen

riniparmila.stialppn@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Pembina Perguruan Nasional

Abstrack

From the objectives of the research carried out, namely: 1. To find out family planning counseling at the Office of Women's Empowerment of Child Protection for Population Control and Family Planning (DP3AP2 & KB) Kota Padang 2. To find out the factors that influence the implementation of counseling. Family Planning By the Office of Women's Empowerment of Child Protection Population Control and Family Planning (DP3AP2 & KB) Padang City. This study uses descriptive method with a qualitative approach.

From the results of the research and discussion, the following conclusions and suggestions were obtained: 1. Family planning counseling at the Office of Women's Empowerment of Padang Population Control and Family Planning (DP3AP2 & KB) "is a process of delivering information to change behavior through non-formal education. Such behavior changes are not necessarily due to counseling but are influenced by other factors. 2 Factors that influence the implementation of such counseling include the level of education, the level of socio-economic, traditional customs, public trust and the availability of time to attend an extension program. From the above conclusions, it is suggested the following: 1. It is expected that extension agents at DP3AP2 & KB Kota Padang can prepare themselves before going down to the field because there are still many target groups that differ in education and economic background 2. For successful extension, it is necessary to coordinate with other agencies that have the same extension program.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang merupakan Revisi Renstra dari Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Tahun 2014-2019.

Revisi dokumen renstra ini dilakukan sebagai implikasi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB).

Dinas ini merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di

bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu bidang kegiatan dari Dinas ini adalah Keluarga Berencana (KB) yang merupakan

1. Upaya peningkatan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga,
2. Untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
3. Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas.

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang, maka ruang lingkup kegiatan Dinas Pemberdayaa Perempuan Perlindungan anak dan KB ini difokuskan kepada pelaksanaan kebijakan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Program Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang memerlukan aktifitas sosialisasi dan pemahaman terhadap Keluarga Berencana bagi para keluarga dalam membina kehidupan berkeluarga yang sejahtera melalui kegiatan penyuluhan .

Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui peningkatan pemakaian alat kontrasepsi dikalangan masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS), guna menurunkan *fertilitas* (angka kelahiran).

Keikutsertaan (*partisipasi*) masyarakat secara lebih meluas didalam program Keluarga Berencana (KB) tersebut baik dalam arti kuantitas maupun kualitas memang merupakan tantangan di dalam pencapaian target program dan tujuan akhir daripada Dinas DP3AP2&KB Kota Padang.

Dalam upaya memaksimalkan hasil program yang dilaksanakan oleh DP3AP2&KB berbagai hambatan masih ditemui antara lain :

1. Pasangan suami istri yang kurang memiliki program atau perencanaan dalam berkeluarga, kapan memiliki anak, berapa jumlah anak yang diinginkan tentunya yang sesuai dengan kemampuan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut melaksanakan prograam tersebut
3. Penyuluhan yang tidak dilakukan secara rutin maupun berkala
4. Banyaknya instansi yang bergerak dibidang keluarga berencana ini

sehingga membingungkan masyarakat itu sendiri .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul : **“Penyuluhan KB Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang”**.

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang, dengan waktu penelitian selama lebih kurang 2 (dua) bulan terhitung Oktober s.d November 2017.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mencoba menggambarkan semua gejala ataupun peristiwa atau fenomena secara apa adanya sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari responden (sumber data), hal ini dilakukan dengan senantiasa mengacu pada pembahasan masalah penelitian yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan dan masalah-masalah yang bersifat aktual. Secara ringkas cara yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah non eksperimental dan analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Interview/Wawancara

Metode interview ini merupakan suatu metode yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara atau dialog langsung dengan responden penelitian untuk mengetahui masalah yang dihadapi. Adapun alasan penulis melakukan metode ini adalah antara lain :

- a) Metode ini berguna sekali bagi penulis dalam menginterpretasikan data-data yang diperlukan atau baru diperoleh dari orang-orang yang penulis temui.
- b) Dengan menggunakan metode ini penulis merasakan adanya penghematan waktu, karena tidak memakan waktu yang lama, hal ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara isan dan hasilnya pun bisa didapat dengan lengkap dan jelas.
- c) Metode ini paling mudah dan paling praktis sekali digunakan karena bisa menginterview langsung terhadap objek yang diteliti.
- d) Metode ini sangat berguna dalam rangka meninjau masalah yang timbul dalam interview berlangsung.

b. Observasi

Adapun penulis menggunakan metode ini adalah :

- a) Metode ini menggunakan cara untuk mengetahui dengan langsung segala macam kejadian.
- b) Metode ini akan lebih mudah menilai segala keterangan yang diperoleh dengan interview.

c. Analisa Dokumen

Teknik yang dipakai untuk memperoleh dan menganalisa data yang diperoleh guna memperkuat dan memperkaya temuan penelitian melalui wawancara dan obeservasi.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam menganalisa data temuan penelitian inia dalah teknik data kualitatif, dimana penulis melakukan beberapa kegiatan secara bertahap dimulai dengan mengumpulkan semua data informasi, mengelompokan data sesuai dengan aspek penelitian, mengintegrasikan data dan berakhir menganalisa data dan informasi dengan cara membandingkan teori ataupun ketentuan-ketentuan yang mendasari permasalahan yang dibahas.

melainkan juga dari pihak pria sebagai kepala keluarga. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sejahtera kondisi fisik, mental dan sosial secara utuh dan bebas dari penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi dan proses reproduksi.

Karena masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Bawah Lima Tahun (AK Balita) Kesehatan Reproduksi ini berfokus pada pemenuhan hak-hak reproduksi, berupa; setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kespro, perempuan dan laki-laki berhak memperoleh informasi lengkap tentang seksualitas, kespro, manfaat dan efek samping obat-obatan, hal mendapatkan pelayanan kesehatan selama hamil sampai melahirkan.

Dimana pemenuhan hak-hak reproduksi diatas masuk kedalam ruang lingkup KESPRO, diantaranya: membahas tentang Keluarga Berencana (KB), informasi tentang pencegahan HIV/Aids, informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, Kesehatan reproduksi bagi Usia lanjut dan kekerasan terhadap perempuan.

Adapun yang diberikan dalam penyuluhan Keluarga Berencana berupa pentingnya ber-KB, siapa saja yang wajib mengikuti program KB, metode KB yang aman bagi keluarga, dimana saja keluarga dapat memperoleh pelayanan KB, dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh keluarga akseptor KB.

Menurut Data BPS tentang Kinerja DP3AP2&KB 2016 hanya berkisar 1,1 persen, jauh dari target

III. PEMBAHASAN**1. Penyuluhan Keluarga Berencana pada BP3AP2& KB Kota Padang**

Kegiatan penyuluhan tentang KB bertujuan untuk membangun tingkat kesadaran setiap keluarga, bukan hanya dari kaum wanita

tahun 2005 sebesar 2,41 persen. Karena itu, perlu upaya sangat keras dari pelaksana program untuk mencapai target partisipasi pria menjadi delapan persen di akhir tahun 2010, dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas tahun 2015. Hal itu mengemuka dalam acara evaluasi pelaksanaan peningkatan partisipasi pria dalam program KB dan kesehatan reproduksi

Kondisi lingkungan sosial, budaya, masyarakat, dan keluarga yang masih menganggap partisipasi pria belum penting dilakukan, menjadi penyebab rendahnya partisipasi pria..Masalah KB dan kesehatan reproduksi masih dipandang sebagai tanggung jawab perempuan, pengetahuan dan kesadaran pria dan keluarga mengenai KB masih relatif rendah. Selain itu, ada keterbatasan penerimaan dan aksesibilitas pelayanan kontrasepsi pria.

Pengetahuan rendah itu misalnya vasektomi, ditakutkan akan menyebabkan impoten. Sedangkan kondom dianggap mengurangi kenikmatan dalam hubungan seksual, merepotkan, dan dipersepsikan hanya untuk penderita atau mencegah penyakit kelamin dan HIV/AIDS saja.

Pendekatan yang diterapkan dalam meningkatkan peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi adalah menempatkan pria untuk memperoleh informasi yang benar. Peran pria dalam KB antara lain sebagai peserta KB dan mendukung pasangan menggunakan alat kontrasepsi. Sedang dalam kesehatan reproduksi, antara lain membantu mempertahankan dan meningkatkan kesehatan ibu hamil.

Merencanakan persalinan aman oleh tenaga medis, menghindari keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, membantu perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, menjadi ayah yang bertanggung jawab, mencegah penularan penyakit menular seksual, menghindari kekerasan terhadap perempuan, serta tidak bias gender dalam menafsirkan kaidah agama.

Peningkatan partisipasi pria diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah dan menanggulangi infeksi saluran reproduksi serta penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

Dalam melakukan penyuluhan program KB, maka penyuluh yang baik harus melakukan penyuluhan sesuai dengan langkah-langkah dalam penyuluhan sebagai berikut (*Effendy, 2002 324*):

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat.
2. Menyusun perencanaan penyuluhan
3. Memilih metoda yang tepat
4. Pelaksanaan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan KB pada DP3AP2&KB merupakan kegiatan komunikasi yang ditandai dengan adanya proses penyebaran pengetahuan dari seorang penyuluh (komunikator) kepada masyarakat sasaran (komunikan) dengan tujuan meningkatkan pengetahuan (Suprpto & Fahrianoor, 2004: 11).

Dalam penyuluhan dibutuhkan petugas penyuluh yang bertugas untuk menyampaikan atau memberi informasi kepada. Sedangkan adanya

tujuan merupakan pedoman atau arah yang harus dicapai dalam tindakan pelaksanaannya. Dalam penerimaan pesan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam menangkap pesan yang diterima.

Cara penerimaan pesan ada yang cukup dengan mendengar saja, atau melihat dan juga ada yang harus mempraktikkannya. Adapun penggunaan kombinasi dari berbagai metoda penyuluhan akan banyak membantu mempercepat proses perubahan. Dalam penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak metoda penyuluhan yang akan digunakan, akan lebih banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu

Adapun tujuan penyuluhan Keluarga Berencana khususnya mencakup empat hal yaitu:

1. memberikan informasi kepada pasangan keluarga tentang kesehatan reproduksi;
2. meningkatkan kepekaan opini masyarakat tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga /rumah tangga
3. memberdayakan pasangan keluarga dalam membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab;
4. memberikan pelayanan kesehatan dan konsultasi psikologis maupun medis terhadap keluarga

Jadi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan KB pada dasarnya adalah upaya untuk memberi informasi tentang kesehatan reproduksi kepada

asaran sehingga meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab (BKKBN, 2000: 25)

Untuk melihat apakah penyuluhan yang dilaksanakan DP3AP2 & KB bermanfaat atau tidaknya maka penulis mengacu kepada indikator penyuluhan itu sendiri yaitu :

a. Bermakna (*meaningful*)

Adapun materi penyuluhan diambil berdasarkan buku modul pelatihan konseling kesehatan reproduksi dalam rumah tangga yang diterbitkan oleh Yayasan Pelita Ilmu (Solehudin dkk, 2004: 38)

Untuk bisa bermakna kegiatan ini tentu diawali terlebih dahulu melalui perencanaan program Dalam perencanaan tugas PLKB akan diketahui bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang

Langkah-langkah perencanaan tersebut adalah

- a. Penguasaan/identifikasi potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data
- b. Penentuan masalah prioritas
- c. Penyusunan rencana kerja
- d. Penyusunan jadwal.

Hal pertama yang penulis tanyakan adalah bagaimana penguasaan/identifikasi potensi wilayah sejak pengumpulan data yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang kepada PLKB sebelum merencanakan kegiatan penyuluhan

b. Nyata (Realistik)

Pengorganisasian adalah kegiatan nyata yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Secara khusus pengorganisasian merupakan suatu proses mengorganisasikan orang-orang untuk melakukan misi utama mereka. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah PLKB dalam mensukseskan program KB nasional yang telah ditentukan.

Maka untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan apakah ada pengorganisasian yang dilakukan PLKB, telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijelaskan di atas. Bapak Ir. Heryanto Rustam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2&KB) Kota Padang

Dalam perekrutan kader PLKB harus dengan dasar dan pertimbangan yang matang. Hal ini terlihat dari yang beliau sampaikan harus meninjau dari segi pendidikan, keaktifan berorganisasi, atau dari LSM. Hal ini dimaksudkan agar kader PLKB yang nantinya akan bertugas setidak-tidaknya sudah mampu memahami struktur dari tugas yang akan dilakukan, tentu sebelum melaksanakan perannya sebagai kader PLKB sudah dibekali dengan wawasan dan pengetahuan.

Pada langkah yang ketiga ini PLKB harus dapat memanfaatkan dan memerankan kader yang telah dibentuk dan menjalin hubungan kerjasama dengan kemitraan yang ada, hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pelaksanaannya dalam mensukseskan program yang telah dibuat terutama KB Nasional.

c. Jelas

Pelaksanaan dan pengelolaan program yang dilakukan PLKB dengan cara peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelolaan program KB dengan mengadakan, penyiapan kader dan mitra, memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada kader serta mitra, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dasar-dasar serta metode dan teknik penyuluhan sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan di lapangan.

Untuk mengetahui hal ini penulis pertama-tama menanyakan apakah penyiapan kader dan mitra yang dilakukan oleh PLKB untuk meningkatkan kapasitas kader penyuluh dalam pelaksanaannya sebagai penyuluh dalam pelaksanaan dan pengelolaan program hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan penyiapan kader dan mitra, hal ini sangat penting dilakukan mengingat kegiatan penyuluhan bermaksud mengubah perilaku negative dari individu atau masyarakat kearah yang positif, sehingga mereka tahu, mampu, dan mau melaksanakan cara-cara hidup sehat bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat lingkungan.

Persiapan kader dan mitra adalah hal pokok yang harus dilakukan hal ini dimaksudkan agar proses yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling menjaga hubungan yang baik dengan kemitraan. Kemitraan disini maksudnya adalah lembaga pemerintahan maupun swasta disetiap kecamatan yang memiliki visi yang sama untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa penyuluhan yang akan dilakukan adalah berbagai kegiatan yang terencana dan terarah yang bertujuan untuk merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, keluarga, atau masyarakat.

Dalam kehidupan perlu diketahui ada tiga unsur prilaku yang harus dirubah untuk berhasilnya kegiatan penyuluhan yaitu meliputi pengetahuan, sikap, tindakan. Unsur-unsur inilah yang menjadi tugas pokok seorang penyuluh yang mana harus dapat merubah pengetahuan, sikap, dan tindakan ke arah yang lebih baik lagi. Jika semua ini terjadi maka penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh dapat dikatakan berhasil sebab penyuluh dapat mengubah prilaku seseorang dengan menanamkan pengertian yang baik.

d. Dapat diukur

Secara teknis PLKB, Kader Penyuluh, serta mitra dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan program KB nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun dalam aspek pengembangan ini penulis mencoba mengetahui tentang

teknis pengembangan kemampuan yang dilakukan PLKB Kader Penyuluh dan kemitraan.

Penyuluh harus dapat mengembangkan kapasitasnya sebagai PLKB, dengan kata lain penyuluh harus dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dalam penyampaian informasi. Tidak monoton dengan cara-cara yang lama melainkan dengan ide-ide dan gagasan yang baru.

Penyuluh dan mitra harus dapat bekerja sama dalam mensosialisasikan program KB nasional dan mengembangkan kapasitasnya sebagai penyuluh dengan menggunakan strategi yang baru, dikarenakan tingkat kemajuan teknologi yang semakin mudah untuk diakses dan tingkat kesadaran penduduk perkotaan tentang pentingnya ber KB. Dalam pengembangan ini PLKB dan mitra juga dituntut agar dapat mengembangkan kemampuannya sebagai PLKB dalam membina

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terhadap sasaran dalam keberhasilan penyuluhan Program Keluarga Berencana :

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang menerima informasi didapatnya.

b. Tingkat Sosial Ekonomi

Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima informasi baru.

c. Adat Istiadat

Pengaruh dari adat istiadat dalam menerima informasi baru merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

d. Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah mereka kenal, karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dengan penyampai informasi.

e. Ketersediaan Waktu di Masyarakat

Waktu penyampaian informasi harus memperhatikan tingkat aktifitas masyarakat untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melihat penyuluhan yang dilaksanakan DP3AP2 & KB bermanfaat atau tidaknya penulis mengacu kepada indikator penyuluhan yaitu, bermakna (*meaningful*), nyata (*realistik*), jelas, dan dapat diukur.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan tersebut diantaranya adalah Tingkat pendidikan, tingkat Sosial

Ekonomi, Adat Istiadat, Kepercayaan masyarakat dan ketersediaan waktu untuk mengikuti program penyuluhan.

B. Saran

1. Diharapkan penyuluh pada DP3AP2 & KB Kota Padang dapat menyiapkan diri sebelum turun kelapangan karena kelompok sasaran masih banyak yang berbeda baik pendidikan maupun Latar belakang ekonominya
2. Untuk berhasilnya penyuluhan maka perlu kordinasi dengan instansi lain yang memiliki program penyuluhan yang sama .

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman (2008), *Beberapa Fungsi Dukungan Keluarga Dalam Ber-KB*, Gunung Agung
- Harahap (2001), *Partisipasi Sebagai Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan*, Bina Aksara
- Keith Davis (2000), *Pengertian Partisipasi*, Ghalia Indonesia
- Mardikanto (2003), *Partisipasi Merupakan Suatu Bentuk Khusus Dari Interaksi Dan Komunikasi*, Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- SM. Kallis, dkk (2006), *Buku Pintar Jilid I dan 24*, STIA LPPN YPGP Padang
- Syarif (2006), *Pengertian Administrasi, Motif Social*. Jogyakarta
- Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan*

*Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera*

*Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun
1999 tentang Otonomi Daerah*

*Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7
tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009.*